

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Muh. Nur Hidayat

NPP. 31.0955

*Asdaf Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: muhnurhdayat@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: *This research focuses on the effectiveness of implementing the Regional Development Information System (SIPD) in the development planning process at the Regional Development Planning, Research, and Development Agency of Pasangkayu Regency. **Purpose:** This research aims to understand how SIPD is implemented in the development planning process at Bappeda Litbang Pasangkayu Regency, identify the determining factors for SIPD implementation, and the efforts made to overcome the inhibiting factors in the SIPD implementation at Bappeda Litbang Pasangkayu Regency. **Method:** This research was conducted using qualitative methods and an inductive descriptive approach according to Sugiyono (2015). Data collection techniques included interviews with 8 informants, observation, and documentation. **Results/Findings:** The research indicates that the use of SIPD in the preparation of Regional Development Planning has been effective and efficient, as it greatly assists the Regional Government in preparing development planning documents. However, there are still obstacles in its implementation, such as the quality and quantity of human resources managing SIPD, occasional system issues, and frequently unstable telecommunications networks. Efforts made include continuous guidance and training for employees on operating SIPD, optimizing the network, and actively and quickly coordinating with the Ministry of Home Affairs when problems arise in this system. The suggestions given are to increase the time for guidance and training related to SIPD operation, enhance network capacity, and actively evaluate SIPD implementation in Development Planning. **Conclusion:** Based on the research results, it can be concluded that the preparation of regional development planning through SIPD in Pasangkayu Regency has been running well and can be considered effective and efficient.*

Keywords: *Effectiveness, Development Planning, Regional Government Information System*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu, mengetahui faktor determinan penerapan SIPD serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan SIPD di Bappeda Litbang

Kabupaten Pasangkayu. **Metode:** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif induktif menurut Sugiyono (2015). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan sebanyak 8 orang, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah efektif dan efisien, karena sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti, kualitas dan kuantitas SDM pengelola SIPD, sistem yang terkadang bermasalah, serta jaringan telekomunikasi yang sering tidak stabil. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPD, mengoptimalkan jaringan, serta selalu aktif dan gerak cepat dalam berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ketika terjadi masalah dalam sistem ini. Saran yang diberikan yaitu menambah waktu bimbingan dan pelatihan terkait pengoperasian SIPD, meningkatkan kapasitas jaringan, serta aktif dalam mengevaluasi pelaksanaan SIPD dalam Perencanaan Pembangunan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD di Kabupaten Pasangkayu sudah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan sudah efektif dan efisien,

Kata Kunci: Efektivitas, Perencanaan Pembangunan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi dan sistem data di era sekarang ini tumbuh sangat pesat dengan adanya kemajuan teknologi. Sehingga Peranan pemerintahan daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi sangat dibutuhkan pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah khususnya 2 dibidang perencanaan pembangunan. Sistem informasi pemerintah daerah ialah system pendukung pada perluasan infrastruktur system pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan SPBE yang sudah terintegrasi nasional pada satuan utuh guna memberi dukungan pada capaian Good governance (Nataniel, 2009). Terciptanya suatu sistem informasi secara umum memberikan manfaat guna mengolah data dan menghasilkan informasi, itulah yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintahan. Dengan demikian diharapkan SIPD dapat menghasilkan output yang bermanfaat terhadap kemajuan daerah seperti menyajikan data output yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam suatu daerah. Perencanaan ialah tahap keberlanjutan yang melibatkan pilihan-pilihan yang dibuat dengan beragam cara guna memaksimalkan sumberdaya yang ada agar tujuan dikemudian hari bisa tercapai (Kartono & Nurcholis, 2016). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Pasangkayu yakni instansi pemerintahan yang dituntut menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik melalui tanggung jawab tugas dan fungsinya. Bappeda Kab. Pasangkayu perlu menyusun RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan 3 sebagai rancangan setiap tahunnya. Penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat agar lebih efektif. Data dan informasi yang terintegrasi harus menjadi landasan dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memfasilitasi transparansi informasi publik. Selain itu, akan lebih mudah bagi kementerian dan lembaga

pemerintahan guna mengumpulkan statistik kemajuan dengan cepat dan tepat. SIPD berisi tentang semua anggaran pemerintahan seperti dokumen-dokumen rancangan, anggaran, pelaksanaan, dan tata usaha.

Kendala dalam implementasi SIPD Kab. Pasangkayu adalah terjadinya keterlambatan dalam tahapan Penyusunan APBD Pokok dan APBD Perubahan dan Laporan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 dan 2022. Dilakukannya analisis terhadap keterlambatan penyampaian Rancangan KUA-PPAS dan keterlambatan kesepakatan bersama diakibatkan oleh keterlambatan perangkat daerah dalam perampungan penginputan perencanaan dalam aplikasi SIPD pada beberapa perangkat daerah yang berbasis elektronik. Dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab keterlambatan dalam beberapa tahapan atau proses penyusunan APBD diakibatkan oleh proses penginputan SIPD yang mengalami keterlambatan. Faktor lain adalah penggunaan SIPD merupakan transisi dari penggunaan aplikasi SIMDA BPKP yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebelumnya. Transisi ini berdampak pada kesiapan SDM perencana dan penyusun program pada perangkat daerah. Faktor lain adalah peraturan perundang-undangan itu sangat cepat mengalami perubahan. Hal ini disebabkan penyesuaian yang sangat cepat dalam kebijakan tata kelola perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 mengalami perubahan untuk pedoman nomenklatur perencanaan tahun 2021 dengan dikeluarkannya Kemendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Kemendagri No. 050-5889 Tahun 2021 ini mencabut Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 dan dinyatakan tak berlaku sejak 27 Desember 2021. Nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah didalam lampiran Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 menjadi nomenklatur dalam Aplikasi SIPD yang baru.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan SIPD di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu. Penerapan SIPD menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam tahapan Penyusunan APBD Pokok dan APBD Perubahan dan Laporan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2022 yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian Rancangan KUA-PPAS dan keterlambatan kesepakatan bersama diakibatkan oleh keterlambatan perangkat daerah dalam perampungan penginputan perencanaan dalam aplikasi SIPD pada beberapa perangkat daerah yang berbasis elektronik, dan transisi dari penggunaan aplikasi SIMDA BPKP yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebelumnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Afrilia Bella Karundeng, Johannis E. Kaawoan, Sofia E. Pangemanan (2021) yang berjudul "Pengimplementasi an Kebijakan SIPD Di Bappeda Kab. Kep, Siau Tagulandang Biaro" menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah dikelola Bappelitbang Sitaro telah terselenggara baik yang terintegrasi SIPD dan harus dipakai ditahun 2021. Penelitian Nanda Dias Ekaputra, (2021) menemukan bahwa ika pemakaian aplikasi SIPD belum efektif pada tahun pertama penerapannya. Hal ini disebabkan oleh minim pemahaman pada aplikasi dan perubahan nomenklatur yang menjadikan kebingungan Pemda ketika menyusun dokumen RKPD. Penelitian Muhammad Irfan Nasution, Nurwani (2021) Penelitian ini menjelaskan bahwa SIPD memiliki peranan dalam mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian ini didasari beberapa peneliti yang memiliki sebagian kesamaan dalam variabel penelitian sebagai bentuk pengembangan dari penelitian ini. Penelitian oleh Ekaputra (2021) mengenai penggunaan SIPD dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk, yang menjadi temuan adalah penyusunan Dokumen RKPD masih kurang efektif apabila dilihat dari RKPD yang dihasilkan hingga upaya yang dapat dilakukan yakni melaporkan permasalahan terkait sulitnya mengakses aplikasi SIPD kepada pemerintah pusat untuk dapat segera ditindak lanjuti. SIPD yang diterapkan di BPKAD Kota Pekanbaru ditinjau belum efektif terutama dalam hal komunikasi

yakni sejalanannya antara pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkronisasi (Vitrian Agustian & Ahyaruddin, 2022). Penelitian Maulana Yusuf, 2016. Pengaruh SIPKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini Mengkaji tentang Implementasi SIPKD Provinsi Jawa Barat mampu menangani konsolidasi data sehingga data dapat terintegrasi dengan baik. Penelitian Nur Fadhilla Rachmadani, 2019. Implementasi good governance di dalam badan pengelolaan keuangan di Denpasar. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam di BPKAD Kota Denpasar telah diwujudkan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan SIPKD. Penelitian Iqbal Rafiqi, 2021. Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi e-Budgeting pada Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai sasaran, yaitu untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Penelitian Nila Cahyati, 2021. Apakah Integrasi SIPD Mempengaruhi Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Penelitian ini Menganalisis dan mengamati pengintegrasian tata kelola sistem informasi keuangan dalam SIPD mendukung penerapan tata kelola yang baik di BPKAD Pemerintah Kota Malang. Penelitian Muhammad Zaky Harahap, 2022. Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, dan belum maksimalnya dalam pengoperasian SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konsep penelitian yang digunakan yaitu teknik analisis data menurut Creswell (2018). Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer menurut Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon yang meliputi 4 dimensi yaitu organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memperoleh interpretasi efektivitas pengelolaan SIPD yang ada di Kabupaten Pasangkayu dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala pada pemanfaatannya.

II. METODE

Seperti yang dinyatakan oleh Mukhtar (2013: 10) metode kualitatif ialah teknik yang dipakai guna menemukan wawasan pada riset dengan waktu tertentu. Riset ini memakai teknik kualitatif, melalui penelaah akan membahas dan mengemukakan permasalahan penerapan SIPD pada Bappeda di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif induktif menurut Sugiyono (2015). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara dengan 8 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang, Kepala Sub Koordinator Penyusunan Program Bappeda Litbang, Kabid Perencanaan Makro, Monitoring, dan Evaluasi Bappeda Litbang, Staff Bidang Perencanaan Makro, Monitoring, dan Evaluasi selaku admin SIPD Bappeda Litbang, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu, Kabid Informasi dan Aplikasi Informatika Diskominfo, serta Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer menurut Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2007) yang meliputi 4 dimensi yaitu organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian.

3.1 Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

Peneliti menganalisis penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer menurut Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2007) yang meliputi 4 dimensi yaitu organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian.

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

Sebelum SIPD diterbitkan oleh Kementerian dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan sebuah sistem yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan serta kinerja dari pemerintah daerah serta sebagai bentuk penyelenggaraan good governance dalam akomodasi praktik-praktik terkait pengelolaan keuangan daerah. SIMDA sendiri bersifat dinamis dan fleksibel agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi dari masing-masing pengguna, sehingga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan informasi yang dibutuhkan Pemerintah Pusat, Lembaga, dan Instansi Pemerintah termasuk juga kebutuhan Pemerintah Daerah sendiri. Program aplikasi SIMDA antara lain: SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA gaji, SIMDA pendapatan, SIMDA perencanaan, SIMDA dashboard, SIMDA CMS (Cash Management System) / kasda online / SP2D online. Pada tahun 2019 untuk menyamakan persepsi serta mengintegrasikan seluruh pengelolaan SIPD, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan sebuah sistem yaitu SIPD melalui sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD sehingga dengan adanya Permendagri ini secara otomatis mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Oleh karena itu untuk mendukung kebijakan ini maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sendiri mulai menggunakan SIPD dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan SIPD maka setiap organisasi perangkat daerah dapat melakukan penginputan data secara otomatis dan terintegrasi dalam satu server. Didalam SIPD ini mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban. Dimana bidang perencanaan menjadi tanggungjawab dan kontrol dari BAPPEDA, sedangkan untuk penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban menjadi tanggungjawab dan kontrol dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda Litbang Bapak Muhammad Sadli, MH pada tanggal 15 Januari 2024, diketahui bahwa:

Dengan adanya SIPD ini maka akan semakin mempermudah Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik itu dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dsb. Sistem ini juga memudahkan kontrol dari Pemerintah Pusat terhadap pembangunan, keuangan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya. Sistem ini juga mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif, cepat serta tepat sasaran.

Penerapan SIPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan di lingkup Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Karena semenjak dikeluarkannya SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sudah langsung menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Dengan adanya SIPD

Ini maka akan semakin mempermudah proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasangkayu

2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat

Pembuatan sistem berbasis web atau online proses pengelolaan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Efisiensi Waktu

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan menggunakan SIPD dapat memberikan dampak terhadap efisiensi waktu. Hal ini dikarenakan proses input data dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat yang mendukung seperti sistem android atau ios, komputer yang didukung dengan jaringan internet, serta printer untuk mencetak dokumen anggaran.. SIPD memiliki tujuan meminimalisir keterlambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

2. Kontrol Anggaran Yang Lebih Baik

Dengan menggunakan SIPD, anggaran dapat dikendalikan dan dikontrol dengan baik. Dalam sistem ini setelah proses penginputan data perencanaan dan penganggaran, maka akan muncul anggaran yang telah mencakup keseluruhan daerah. Jadi nominal anggaran yang diajukan sudah ada sehingga tinggal disesuaikan dengan kegiatan dan target daerah. Selain itu pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam anggaran tidak dapat ikut campur dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran.

**Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.414.337.070	3.066.419.690
2.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3.221.057.100	3.018.990.000
3.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	846.991.000	777.273.500
4.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.057.678.700	988.231.640

Sumber: *Data laporan realisasi anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023*

Tabel diatas menjelaskan mengenai anggaran dan realisasi anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023, dimana program-program tersebut berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan SIPD di Bappeda. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditinjau bahwa tiap program memiliki anggaran yang cukup dalam melaksanakan program tersebut sehingga kontrol anggaran dapat dijalankan dengan baik berkat penerapan SIPD.

3. Kemudahan Akses

Era globalisasi menuntut Pemerintah untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, maka bermunculan berbagai inovasi yang bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan Pemerintah dalam berbagai hal, salah satunya dalam penyusunan rencana kerja. Dengan menggunakan SIPD maka pegawai yang menyusun rencana kerja melakukan proses

input penyusunan rencana kerja hingga tahap output dari penyusunan rencana kerja dengan lebih efektif. Karena akses SIPD bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan internet, perangkat yang mendukung dan memiliki akun (id dan password). Berdasarkan data dan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, untuk kebijakan penerapan SIPD dalam penyusunan rencana kerja OPD di Kabupaten Pasangkayu belum ada peraturan khusus yang mengatur. Penerapan sistem ini belum dimasukkan ke dalam Peraturan Bupati karena bersifat tidak parsial. SIPD ini diberlakukan di seluruh OPD di Kabupaten Pasangkayu secara otomatis dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang SIPD. Penerapan SIPD di Kabupaten Pasangkayu, tentunya membawa perubahan dan peningkatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik dari perencanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem ini dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan membagi aspek pengelolaan sesuai dengan bidang masing-masing dan ditunjuk peran validator dan koordinator untuk dapat me-review data yang di input. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 15 Januari 2024, diketahui bahwa:

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu membuat kebijakan untuk membagi tim pengelola SIPD agar sistem ini berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelola utama yang ditunjuk untuk mengontrol dan me-review SIPD ini adalah Sekretaris Daerah. Kemudian Sekretaris Daerah ini membawahi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Inspektorat Daerah. TAPD ini dibagi lagi menjadi dua yaitu perencanaan yang dipegang dan menjadi tanggungjawab Bappeda Litbang untuk menyusun RKPD dan tim penganggaran yang dipegang dan menjadi tanggungjawab Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian inspektorat akan mereview kegiatan TAPD baik itu dalam hal perencanaan ataupun penganggaran.

Dalam penyusunan dokumen Kabupaten (RKPD, KUA/PPAS, APBD) tentunya melibatkan semua aspek Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dibutuhkan koordinasi yang baik antara seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu dilakukan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD oleh Bappeda Litbang kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasangkayu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 15 Januari 2024 mengatakan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan masing-masing OPD untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan SIPD. Selain itu BAPPEDA melakukan pembinaan dan pelatihan masing-masing OPD, agar mereka bisa menggunakan sistem ini dengan baik. Karena jika masing-masing OPD ini tidak bisa menggunakan sistem ini, maka proses pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan koordinasi dengan OPD lainnya.

Penggunaan SIPD di Kabupaten Pasangkayu ini dilaksanakan di masing-masing bidang pemerintahan, setelah itu dibagi lagi turunannya agar sistem bisa langsung berjalan. Seperti bagian perencanaan yang membagi lagi tugasnya dengan

dibuatkan user bagi masing-masing tim dalam bidang perencanaan. Pembagian ini disesuaikan dengan tupoksi dari sub bidang masing-masing. Hasil wawancara bersama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, pada tanggal 16 Januari 2024, diketahui bahwa:

Pelaksanaan SIPD di level kabupaten, Bappeda sebagai admin kabupaten mengurus perangkat daerah lainnya dan kelurahan mengenai perencanaan pembangunannya. Lebih detail dalam SIPD diurus oleh masing-masing bidang sesuai dengan bidang koordinasinya misalnya bidang keuangan yang mengurus OPD dalam lingkup keuangan atau anggaran. Jadi, setiap pegawai harus mengetahui pengoperasian SIPD ini, walaupun dengan keterbatasan pegawai yang ahli di bidang IT, tetapi kami mampu menyelesaikan penginputan data dan dokumen ke dalam SIPD meskipun ada sedikit hambatan dalam prosesnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu terkait dengan kemampuan pembelajaran pada pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan di Bappeda Litbang bahwa sebagai admin kabupaten yang mengurus perencanaan daerah secara makro, Bappeda Litbang terus berusaha untuk dapat meningkatkan pemahaman pegawai dalam mengoperasikan SIPD ini walaupun pada awalnya admin SIPD belajar memahami pengoperasiannya melalui youtube dan buku panduan SIPD yang kemudian ikut dalam pelaksanaan diklat atau bimbingan teknis penerapan SIPD.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD di Kabupaten Pasangkayu sudah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan sudah efektif dan efisien, meski jika dilihat dari segi SDM masih terdapat kekurangan didalamnya, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu terus melakukan upaya untuk meminimalisir kekurangan tersebut. SIPD sendiri sudah digunakan sepenuhnya oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu. Namun masih diperlukan upgrade terhadap sistemnya agar proses penyusunan perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Sumber daya manusia yang mengelola sistem ini dan yang terlibat didalamnya sudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan dengan sama. Berdasarkan hasil temuan yang didapat oleh peneliti hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Nurwani (2011) dalam kajian mengenai penerapan SIPD di BPKAD Kota Medan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah bahwasanya lebih memfokuskan pada laporan keuangan sebagai giat awal dalam memulai penganggaran, penelitian Fahmi Arif Ahmad (2021) yang meneliti tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti juga menemukan bahwa yang menjadi salah satu penghambat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui SIPD di Kabupaten Pasangkayu adalah kecakapan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengambilan data sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan dan didukung kajian teori dari tinjauan pustaka, maka dapat disimpulkan bahwa Penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD di Kabupaten Pasangkayu sudah berjalan dengan baik atau

dapat dikatakan sudah efektif dan efisien, meski jika dilihat dari segi SDM masih terdapat kekurangan didalamnya, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu terus melakukan upaya untuk meminimalisir kekurangan tersebut. SIPD sendiri sudah digunakan sepenuhnya oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu. Terdapat beberapa hambatan yaitu proses perencanaan yang diantaranya jaringan yang sering tidak terkoneksi ataupun jaringan dengan loading yang lama, serta system error akibat penggunaan yang overload sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan input data-data perencanaan maupun penganggaran. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu dalam menghadapi hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan di Kementerian Dalam Negeri, melalui peningkatan kapasitas jaringan internet agar sistem dapat berjalan dengan baik dan efektif dari segi waktu, serta terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar permasalahan sistem atau system error yang sering terjadi dapat teratasi sehingga proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama yakni waktu penelitian penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai lokus penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan Penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahmi Arief, R. H. (2021). (n.d.). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DILIHAT DARI ASPEK STRUKTUR BIROKRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/465>
- Cahyati, N., dan Mukhlis Imam., (2021). Does Integration Of Information System Technology Influence Good Governance Implementation In Public Service In Regional Government?. International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation Halaman 28-42. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijarti/article/view/16630>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Otonomi, 21(1),62–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1>. 1606
- Fadhilla, Nur, R. Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Denpasar. Jurnal. Halaman 1-17 <https://www.scribd.com/document/671202440/54060-1021-128101-1-10-20191029-7>
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Ghalia. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16387>
- Kartono, D., & N. H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

- Laudon KC, & JP Laudon. 2007. Management Information Systems :Managing the Digital Firm. 10th Edition. New Jersey: PearsonPrentice-Hall.
[https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Kenneth C. Laudon,Jane P . Laudon --
_Management Information System 12th Edition .pdf](https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Kenneth_C._Laudon,Jane_P._Laudon_-_Management_Information_System_12th_Edition_.pdf)
- Maulana Yusuf, Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal, 2016 <https://journal.widyadharma.ac.id>
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group) https://www.perpustakaan.unsada.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3176
- Muhammad Zaky Harahap, 2022. Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance di Kota Medan provinsi Sumatera Utara. <http://eprints.ipdn.ac.id/9265/>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akutansi Dan Keuangan, 9(2), 109–116.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nataniel, D. , & H. H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. <http://dx.doi.org/10.30872/jim.v4i1.27>
- Rafiqi, Iqbal. Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). Journal Of Islamic Economic Business. Halaman 115-138. <https://10.28944/assyarikah.v1i2.381>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, D. M. (2015). PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. 4(2), 231.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20670>

